



PEMKAB
MAJALENGKA

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2023



KECAMATAN CINGAMBUL

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Swt., sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka dapat terlaksana.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas, fungsi serta sebagai media informasi publik atas capaian kinerja Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja selama Tahun 2023.

Kolaborasi menjadi kunci utama dalam mencapai berbagai sasaran yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Konsep kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak membuat langkah kami dalam meningkatkan kualitas pelayanan menjadi lebih ringan. Kami terus melakukan upaya-upaya semaksimal mungkin agar selalu memberikan kemudahan dalam mengakses layanan publik dan meningkatkan kepuasan masyarakat.

Melalui laporan kinerja ini, izinkan kami untuk menyampaikan perjalanan Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka dalam mengiringi proses menuju Majalengka Raharja. Kami berharap agar laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan di tahun selanjutnya. Kami terus beradaptasi dan berinovasi demi menghasilkan yang terbaik untuk masyarakat Majalengka.

Diketahui oleh,	
Sekcam	
Kasi Pem	
Kasi Kesos	
Kasi Trantib	
Kasi PPM	

Cingambul, 28 Februari 2024
Camat Cingambul,

SULAE MAN, S.IP.M.Si.,Kp
Pembina
NIP.197005181998021002

3

2

KATA PENGANTAR

3

DAFTAR ISI

4

BAB I PENDAHULUAN

GAMBARAN UMUM
DATA KEPEGAWAIAN
ISU STRATEGIS
SISTEMATIKA PELAPORAN

15

**BAB II PERENCANAAN
KINERJA**

RENCANA STRATEGIS
PERKIN 2023
RENCANA ANGGARAN 2023

20

**BAB III AKUNTABILITAS
KINERJA**

PENGUKURAN KINERJA 2023
ANALISIS CAPAIAN KINERJA
AKUNTABILITAS KEUANGAN

37

BAB IV PENUTUP

39

LAMPIRAN

Daftar Isi



BAB 1

PENDAHULUAN

Gambaran Umum

Data Kepegawaian

Isu Strategis

Sistematika Pelaporan

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dimaksud dengan pelaporan kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Selain itu, pelaporan kinerja dapat menjadi media penyampaian informasi pencapaian kinerja kepada *stakeholder*. Laporan kinerja yang sudah disusun dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pengambilan kebijakan pada tahun yang akan datang.

Oleh karena itu, Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka setiap tahun harus menyusun Laporan Kinerja yang berkualitas guna mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Laporan kinerja disusun berdasarkan format yang sudah ditetapkan dan mengacu kepada Rencana Strategis Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023, Rencana Kerja serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

1.1 Gambaran Umum Kecamatan Cingambul

Berdasarkan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.

a. Kedudukan

- a) Kecamatan adalah merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- b) Camat sebagai Koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya.

b. Tugas Pokok dan Fungsi

- a) Kecamatan mempunyai tugas pokok merencanakan, mengatur, melaksanakan, mengendalikan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pemeliharaan prasarana dan sarana umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, membina dan mengawasi pemerintahan desa, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan serta melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan melaksanakan tugas pembantuan.
- b) Dalam melaksanakan tugas pokok Kecamatan menyelenggarakan fungsi :
- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
 - b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
 - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;

- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas pelimpahan sebagian kewenangan Bupati dan untuk melaksanakan tugas pembantuan;
- j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Bagan Struktur Organisasi

- a) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :
 - a. Camat.
 - b. Sekretaris Kecamatan, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - 3. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum.
 - 4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
 - 5. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.
 - 6. Seksi Kesejahteraan Sosial.
 - 7. Kelurahan.
 - 8. Kelompok Jabatan Fungsional
- b) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantun dibawah ini :

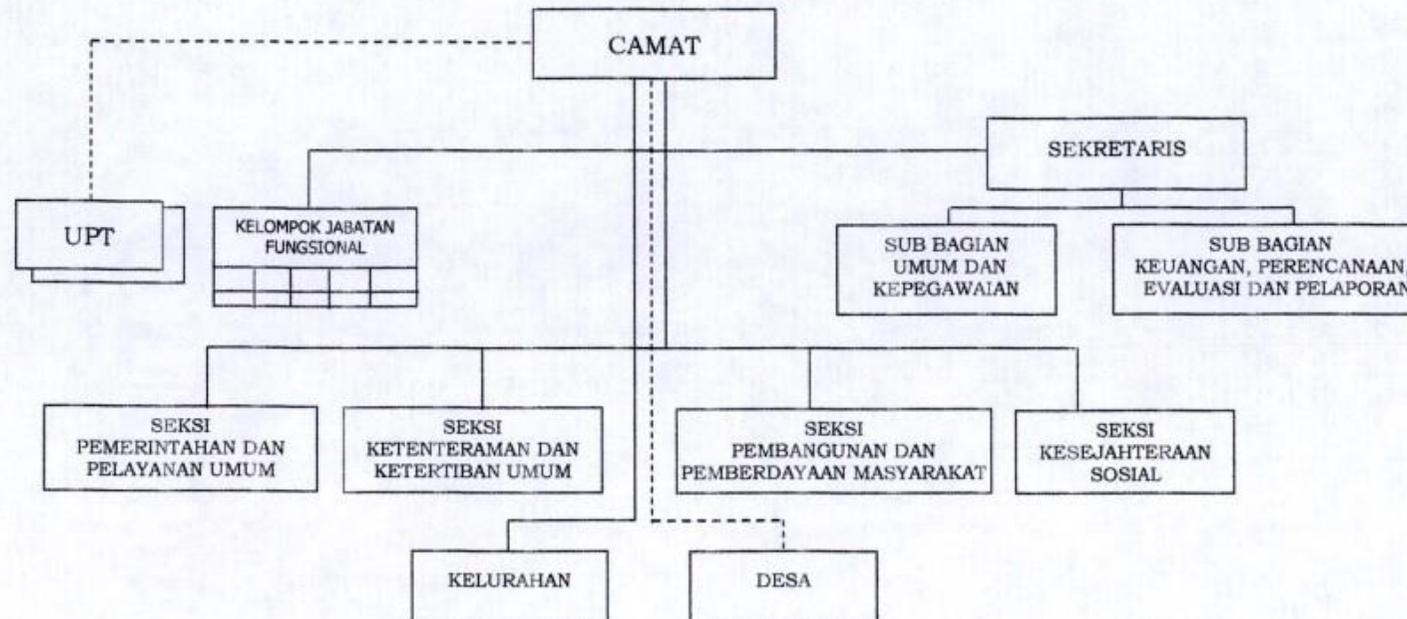
LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 45 Tahun 2019

TANGGAL : 23 Desember 2019

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN
KABUPATEN MAJALENGKA



BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,


AHMAD SODIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


GUN GUN MOCHAMAD DHARMADI
NIP. 19680327 199603 1 003

1.2 Data Kepegawaian

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Cingambul per Tanggal 31 Desember Tahun 2023 berjumlah 16 orang dengan rincian sebagai berikut:

a. Jenis Kelamin

- Perempuan : 2 orang
- Laki-laki : 14 orang

b. Berdasarkan Eselon

- Eselon II a : -
- Eselon II b : -
- Eselon III a : 1 orang
- Eselon III b : 1 orang
- Eselon IV a : 4 orang
- Eselon IV b : 2 orang

c. Berdasarkan Golongan

JENIS	Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV
PNS	-	6	8	2
PPPK	-	-	-	-

d. Berdasarkan Jenis Jabatan

- Jabatan Struktural : 8
- Jabatan Fungsional : -
- Jabatan Pelaksana : 8

e. Berdasarkan Pendidikan :

SD	SMP	SMA	D1	D2	D3	S1	S2	S3
-	1	6	-	-	-	7	2	-

Sumberdaya Manusia Kecamatan Cingambul per 31 Desember sebagaimana tercantum dalam infografik ASN dibawah ini :

INFOGRAFIK ASN KECAMATAN CINGAMBUL



Eselon



Golongan

Jenis Jabatan

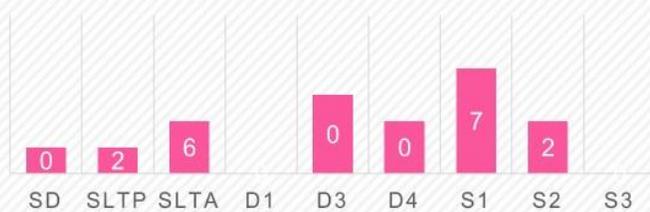
STRUKTURAL



PELAKSANA



FUNGSIONAL



Pendidikan

1.3 Isu Strategis

Isu - Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang diperhatikan dalam perencanaan pembangunan selama 5 (Lima) tahun dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Cingambul kepada masyarakat. Analisa isu - isu strategis diidentifikasi berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Cingambul dalam menjalankan pemerintahan ada berbagai permasalahan, sebagai berikut :

a. Bidang Sekretariat

- 1) Masih kurangnya sumber daya dan keterampilan pegawai dalam mengoperasikan sarana dan prasarana komputer di wilayah Kecamatan Cingambul sehingga memperlambat kinerja kegiatan administrasi perkantoran, untuk meningkatkan kinerja kegiatan administrasi perlu adanya pelatihan dalam mengoperasikan komputer;
- 2) Kurangnya personil di bagian sekretariat Kantor Kecamatan Cingambul, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan pegawai;
- 3) Kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang belum diberikan kewenangan penuh untuk mengajukan dan mengelola anggaran Perangkat Daerah, kewenangan Kecamatan hanya sebatas pengelolaan biaya operasional Kecamatan. Sedangkan pengelolaan anggaran pembangunan masih melalui Perangkat Daerah terkait;

b. Bidang Pemerintahan

Kurangnya personil pengelolaan data pemerintahan umum, pengelolaan data Pemerintahan Desa, pengelola data kependudukan dan pertanahan sehingga untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil dan tenaga operasional.

c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

- 1) Kurangnya personil pengelolaan pemberdayaan masyarakat dan pengelola partisipasi masyarakat, sehingga untuk

- meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil dan tenaga operasional;
- 2) Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah Desa;
 - 3) Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah.
- d. Bidang Keamanan dan kenyamanan lingkungan.
- 1) Kurangnya personil pengelolaan keamanan dan ketertiban dan pengelola kesejahteraan sosial, sehingga untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil dan tenaga operasional;
 - 2) Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;
 - 3) Kurangnya personil Linmas di masing – masing Desa dan Linmas yang ada belum berjalan secara maksimal;
 - 4) Kurangnya sarana dan prasarana Kamtibmas di Kantor Kecamatan Cingambul.
- e. Bidang Ekonomi dan Pembangunan
- 1) Kurangnya personil pengelolaan pengendalian monitoring dan evaluasi pembangunan sehingga untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil dan tenaga operasional;
 - 2) Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Cingambul sudah cukup baik, namun hal ini perlu ditingkatkan keberadaannya, khususnya untuk peningkatan pembangunan jalan desa yang sudah secara bertahap dilakukan pembangunan melalui berbagai program pembangunan. Masalah pembangunan jalan di wilayah Kecamatan Cingambul terkendala dengan cepatnya usia fisiknya, karena struktur tanah yang mudah bergerak, kualitas yang kurang baik dan pada lokasi tertentu sering tergenang air sehingga usia teknis menjadi pendek.
 - 3) Kurangnya personil di bagian Ekonomi dan Pembangunan Kantor Kecamatan Cingambul, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cingambul dihadapkan kepada permasalahan yang timbul dan merupakan faktor penghambat terhadap kelancaran pelaksanaan tugas pokok, sehingga permasalahan yang ada merupakan tantangan yang perlu dikaji dan disikapi agar tugas pokok dan fungsi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Permasalahan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan ini dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal dimana faktor internal merupakan faktor yang menjadi kewenangan OPD sedangkan faktor eksternal timbul dari faktor luar kewenangan OPD dalam melaksanakan fungsi pelayanan, berdasarkan hasil kajian faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pelayanan Kecamatan Cingambul diantaranya :

A. Faktor Internal

1. Aparatur Pemerintahan

- a) Belum meratanya sumberdaya aparatur pemerintahan.
- b) Kinerja aparatur pemerintah masih belum optimal.
- c) Masih kurangnya jumlah karyawan Kecamatan untuk mengoptimalkan peningkatan pelayanan.

2. Sarana dan Prasarana

- a) Kurangnya sarana dan prasarana berupa kelengkapan administrasi perkantoran.
- b) Kurangnya Sarana dan prasarana berupa ruang kerja perkantoran.
- c) Kurangnya fasilitas untuk operasional pelayanan bagi pegawai.
- d) Belum maksimalnya faktor penunjang lingkungan kantor untuk peningkatan pelayanan.

B. Faktor Eksternal, meliputi :

1. Homogenitas masyarakat yang menunjukkan karakteristik berbeda-beda di wilayah kecamatan.
2. Terdapat bagian wilayah pedesaan yang apabila dijangkau memakan waktu yang relatif lama.
3. Masih adanya sarana infrastruktur jalan yang belum memadai untuk peningkatan kelancaran transportasi masyarakat.

1.4 Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan tentang gambaran umum dan isu strategis yang terjadi.

Bab II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan mengenai rencana strategis yang terdiri dari visi, misi, tujuan, sasaran dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menyajikan uraian mengenai Capaian Kinerja Organisasi, dan Realisasi Anggaran untuk mencapai tingkat kinerja organisasi.

Bab IV PENUTUP

Bab ini merupakan kesimpulan atas pencapaian kinerja, kendala, saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023
- Cascading
- Bukti Penyebaran LKIP kepada seluruh pegawai di lingkup Kecamatan Cingambul
- Surat Keputusan Camat Cingambul tentang pembentukan Tim Penyusunan LKIP Tahun 2023

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

RENSTRA

PERKIN 2023

Rencana Anggaran 2023

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 . Rencana Strategis

Kerangka perumusan tujuan dan sasaran dalam Renstra Kecamatan Cingambul Tahun 2018-2023 tentunya mengacu pada RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023.

Tujuan (2018-2023)	Tujuan (Hasil Reviu)
Meningkatnya Reformasi Birokrasi di Kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Sasaran (2018-2023)	Sasaran (Hasil Reviu)
Pengurangan tingkat kemiskinan	Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas
Terwujudnya situasi dan kondisi Yang aman, tentram, dan tertib Di masyarakat	
Meningkatkan ekonomi pedesaan sesuai potensi unggulan	
Meningkatnya status kemajuan Kemandirian desa	
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	
Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas	

Berikut tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) selama lima tahun dengan target sebelum dan setelah perubahan:

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Sebelum Perubahan					Target Setelah Perubahan
					2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	Mewujudkan pemerataan pembangunan di berbagai wilayah dan sektor	Pengurangan Tingkat Kemiskinan	Persentase penurunan Jumlah Rumah Tangga Miskin di Kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	
2	Menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif di masyarakat	Terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentram, dan tertib di masyarakat	Persentase Penanganan gangguan ketentraman dan Ketertiban Umum Skala Kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	
			Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Persen	100	100	100	100	100	
3	Meningkatkan ekonomi pedesaan sesuai potensi unggulan desa	Meningkatkan Ekonomi Pedesaan sesuai potensi Unggulan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen	100	100	100	100	100	
4	Mewujudkan kemandirian desa untuk kesejahteraan masyarakat desa	Meningkatnya status kemajuan kemandirian desa	Persentase desa yang meningkat status perkembangannya	Persen	10	10	10	10	10	
5	Terwujudnya Akuintabilitas Kinerja	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	
			Capaian SKM Perangkat Daerah	Predikat	B	B	BB	B	B	
			Persentase Pemenuhan Penunjang Perkantoran	Persen	100	100	100	100	100	
6	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai						85

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Untuk mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan maka ditetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagai berikut:

Perjanjian Kinerja Sebelum Perubahan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Capaian Sakip Perangkat Daerah	BB Nilai
		Capaian SKM Perangkat Daerah	B Nilai
		Tingkat pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran	90-100 %
		Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di Tingkat Kecamatan	90-100 %
2.	Terwujudnya Situasi dan Kondisi yang Aman, Tenram dan Tertib di Masyarakat	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum skala kecamatan	90-100 %
		Persentase peningkatan wawasan kebangsaan	90-100 %
3.	Meningkatnya Status Kemajuan Kemandirian Desa	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	90-100 %
		Persentase desa yang meningkat status perkembangannya	5-10 %

Perjanjian Kinerja Setelah Perubahan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	85

2.3. Rencana Anggaran Tahun 2023

Untuk mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023, ditetapkan Rencana Anggaran Kecamatan Cingambul Tahun 2023 yang terdiri dari:

No	Program	Rencana Anggaran (Rp)	Persentase (%)
1.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	8.000.000,00	0,30
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.251.879.089,00	84,85
3	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	109.539.000,00	4,13
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	70.670.000,00	2,66
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	202.523.000,00	7,63
6	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	11.425.000,00	0,43
	Jumlah	2.654.036.089,00	100

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran Kinerja 2023

Analisis Capaian Kinerja

Akuntabilitas Keuangan

Capaian kinerja Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka tercermin dari capaian 4 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam Renstra. Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program dan kegiatan termasuk inovasi dalam pelayanan publik serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pengukuran, rata-rata capaian kinerja Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka pada Tahun 2023 sebesar 100%. Secara rinci capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada diagram berikut :

Indeks Kepuasan Masyarakat

100%

IKU 1

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1.	Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	85	100%

PELAYANAN PUBLIK LEBIH DEKAT DAN BERKUALITAS



IKU : Indeks Kepuasan Masyarakat

PERBANDINGAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA



FAKTOR

Yang Mempengaruhi

- Meningkatnya Pelayanan di Bidang Kesejahteraan Sosial
- Meningkatnya Pelayanan di Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
- Meningkatnya Pelayanan di Bidang Pemerintahan dan Pelayanan Umum
- Meningkatnya Pelayanan di Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

PROGRAM

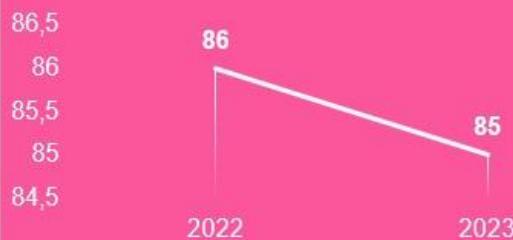
Yang Mendukung

EFISIENSI

Anggaran

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja ini yaitu 3,16% atau sebesar Rp83.445.343,00.

TREN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT



3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

INDIKATOR 1

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

1. Target, Realisasi, Capaian Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1.	Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	85	100%

- Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2023 mencapai nilai 85 dengan kategori Baik.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2023 dengan Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022	Peningkatan/ Penurunan
Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	86	Penurunan 1 poin

- Realisasi Tahun 2023 dengan Tahun 2022, warga yang terlayani oleh pelayanan publik ada penurunan sebesar 1 poin dari tahun sebelumnya dikarenakan pada Tahun 2023 ada pengurangan/relokasi anggaran.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2022	Peningkatan/ Penurunan
Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	100%	tetap

- Capaian Tahun 2023 dengan Tahun 2022, warga yang terlayani oleh pelayanan publik tetap sama 100% dari tahun sebelumnya.

3. Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Target Akhir Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target Akhir Renstra	Hasil Perbandingan
Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	85	100%

- Jika membandingkan realisasi Tahun 2023 dengan target akhir Renstra sudah sesuai dengan target, Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan yaitu 100%.

4. Perbandingan Realisasi 2023 dengan Realisasi Kab. Majalengka

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Realisasi Kabupaten	Hasil Perbandingan
Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	83,26	>1,74

- Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Cingambul lebih besar 1,74 jika dibandingkan dengan realisasi IKM Kab. Majalengka.

5. Faktor - faktor yang mempengaruhi keberhasilan.

a. Meningkatnya Pelayanan di Bidang Kesejahteraan Sosial

- 1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, yaitu melaksanakan kegiatan Pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan monitoring dan evaluasi stunting





- 2) Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan, yaitu melaksanakan kegiatan sosialisai pemuktahiran data kemiskinan sehinga akan tersaji/tersedianya data masyarakat miskin yang valid.



- 3) Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan, yaitu melaksanakan kegiatan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi peningkatan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia terlantar.



- 4) Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional, yaitu melaksanakan kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten dan Peringatan Hari Besar Islam.





b. Meningkatnya Pelayanan di Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

- 1) Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan, yaitu melaksanakan kegiatan sosialisasi potensi unggulan kecamatan (potensi wisata)



- 2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan, yaitu melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada pelaku UMKM.



- 3) Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa, yaitu melaksanakan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan



- 4) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan, yaitu melaksanakan kegiatan sosialisasi/pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan dan organisasi kepemudaan.



c. Meningkatnya Pelayanan di Bidang Pemerintahan dan Pelayanan Umum

- 1) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan, yaitu melaksanakan kegiatan Pelayanan Administrasi Umum di Tingkat Kecamatan



- 2) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan, yaitu kegiatan sosialisasi/monitoring dan evaluasi Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).



- 3) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa, yaitu melaksanakan kegiatan Pembinaan terhadap Aparatur Pemerintah Desa.



- 4) Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, yaitu melaksanakan kegiatan Pemilihan Kepala Desa serentak, sehingga terpilihnya 3 orang Kepala Desa Definitif.



- 5) Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan, yaitu melaksanakan kegiatan sosialisasi dan fasilitasi Lomba Desa Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten



d. Meningkatnya Pelayanan di Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum

- 1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan, yaitu melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimcam) setiap bulan.



- 2) Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, yaitu melaksanakam kegiatan rapat koordinasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat setiap bulan.



- 3) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Ketahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu melaksanakan kegiatan Hari Jadi Majalengja tahun 2023 dan Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia tahun 2023.





Upaya yang akan dilakukan pada tahun selanjutnya antara lain sebagai berikut :

- a) Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, seminar, kursus dll.
- b) Membuat nota dinas usulan untuk pembangunan gedung kantor Kecamatan Cingambul.
- c) Mengusulkan tambahan anggaran melalui Bapedalitbangda dan BKAD Kabupaten Majalengka.
- d) Mengusulkan pengadaan sarana dan prasarana pendukung perlengkapan kantor termasuk belanja modal.
- e) Membina dan menjaga hubungan yang harmonis dengan stakeholders/instansi lain untuk mempermudah koordinasi.

6. Program yang menunjang keberhasilan

No.	Program	Pengampu	Anggaran (Rp)
1	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	- Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	8.000.000,00
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	- Kasubag Umum dan Kepegawaian - Kasubag KPEP	2.251.879.089,00
3	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	- Kasi Kesos - Kasi Pemerintahan dan pelayanan Umum	109.539.000,00
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	- Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	70.670.000,00
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	- Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat - Kasi Pemerintahan dan pelayanan Umum	202.523.000,00
6	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	- Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	11.425.000,00
Jumlah			2.654.036.089,00

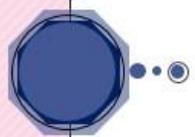
7. Efisiensi

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat pada sasaran Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas yaitu 3,16% atau sebesar Rp.83.445.343,00 dari pagu anggaran Rp.2.654.036.089,00 dengan realisasi Rp2.570.140.746,00.

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Penyerapan anggaran dikaitkan dengan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Serapan Anggaran (%)
1.	Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	96,84%



BAB 4



KESIMPULAN

BAB IV

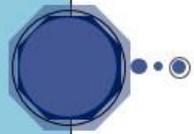
KESIMPULAN

Laporan Kinerja Kecamatan Cingambul Tahun 2023 menyajikan pencapaian kinerja, perbandingan dengan tahun sebelumnya, perbandingan dengan Renstra, perbandingan dengan Jawa Barat, kendala yang dihadapi, upaya yang telah dilaksanakan dan upaya yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan dan memperbaiki capaian tahun selanjutnya.

Capaian kinerja Kecamatan Cingambul pada Tahun 2023 cukup baik dengan nilai 85,00. Hal tersebut karena adanya komitmen dan kolaborasi semua bidang dalam menjalankan tugas.

Kecamatan Cingambul pada Tahun 2023 berhasil menggunakan sumber daya sesuai peruntukannya. Efisiensi sumber daya keuangan pada Tahun 2023 adalah sebesar 3,16% atau sebesar Rp. 83.445.343,00.

Kecamatan Cingambul terus berupaya meningkatkan akuntabilitas kinerja dengan memaksimalkan koordinasi dengan semua bidang dalam menyelenggarakan sistem Pemerintahan yang akuntabel, berorientasi pada hasil yang berdampak baik bagi masyarakat.



LAMPIRAN



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SULAEMAN, S.IP., M.Si.**

Jabatan : Camat Cingambul
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.**

Jabatan : Bupati Majalengka
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.



Majalengka, November 2023

Pihak Pertama,

SULAEMAN, S.IP., M.Si., Kp
N.P. 700518 199802 1 002

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KECAMATAN CINGAMBUL**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	85 Nilai

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Rp 2.251.879.089,00	APBD
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 109.539.000,00	APBD
3.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp 8.000.000,00	APBD
4.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp 202.523.000,00	APBD
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp 70.670.000,00	APBD
6.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	Rp 11.425.000,00	APBD
	JUMLAH	Rp 2.654.036.089,00	



Bupati Majalengka,

[Signature]
Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.



Majalengka, November 2023

Cama Cingambul,

[Signature]
SULAEWAN, S.IP., M.Si.Kp
00518 199802 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
KECAMATAN CINGAMBUL

Alamat : Jalan Raya Cingambul No. 01 Telp ☎ / Fax (0233) 319739
Cingambul 45467 email : kecamatan.cingambul@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT CINGAMBUL KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR : 700.1.1.3/05.1/KEC/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN CINGAMBUL KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN ANGGARAN 2024

CAMAT CINGAMBUL,

- Menimbang : a. bahwa Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah SKPD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 adalah kewajiban SKPD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Cingambul Kabupaten Majalengka tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran daerah Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran daerah Nomor 87);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tanggal 25 September 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2, Seri A);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 34 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Majalengka Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka Tahun 2024 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini;

KEDUA : Uraian Tugas Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kabupaten Majalengka Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Cingambul

Pada Tanggal : 5 Pebruari 2024



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Majalengka;
2. Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka;
3. Yth. Kepala Bapedalitbangda Kabupaten Majalengka;
4. Yth. Sekretaris Kecamatan dan para Kepala Seksi di Lingkungan Kec. Cingambul.

Lampiran I Keputusan Camat Cingambul Kabupaten Majalengka
 Nomor : 700.1.1.3/05.1/KEC/2024
 Tanggal : 5 Pebruari 2024

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM DINAS
1.	Penanggungjawab :	Camat
2.	Ketua :	Sekretaris Kecamatan pada Kantor Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka
3.	Sekretaris :	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Sekretariat Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka
4.	Anggota :	1. Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum pada Kantor Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka.
		2. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kantor Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka
		3. Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Kantor Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka.
		4. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial pada Kantor Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka.
		5. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Kantor Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka

CAMAT CINGAMBUL,

 SULAEMAN

Lampiran II Keputusan Camat Cingambul Kabupaten Majalengka
Nomor : 700.1.1.3/05/1/2024
Tanggal : 5 Pebruari 2024

**URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN CINGAMBUL KABUPATEN MAJALENGKA**

I. Penanggungjawab

1. Mengarahkan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka.
2. Melakukan Monitoring terhadap pelaksanaan tugas Tim Penyusun Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka.

II. Ketua

1. Menyusun Jadwal Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka.
2. Melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka.
3. Membuat Laporan Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi pemerintah Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka.

III. Sekretaris

1. Menyelenggarakan administrasi kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka.
2. Membantu Ketua dalam Melaksanakan Tahapan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka;
3. Membantu Ketua dalam Menyusun Laporan Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka.

IV. Anggota

1. Memberikan masukan dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka;
2. Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka;
3. Membantu Ketua dengan menyediakan data yang diperlukan dalam rangka Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka.

